Laporan Kinerja
BPK Perwakilan Provinsi Banten
Tahun 2019

Integritas-Independensi-Profesionalisme

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menyelesaikan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2019.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten merupakan tahap pertama dari siklus implementasi akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2019 dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK Perwakilan Banten sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2016-2020. Laporan ini memuat pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten selama Tahun 2019 sebagai bentuk pelaporan dan bahan evaluasi dalam upaya perbaikan manajemen kinerja di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.

Secara garis besar, pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2019 menunjukkan perkembangan yang positif bila dibandingkan target yang telah ditetapkan, hal ini tercermin dari skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2019 sebesar 99,83.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2019 ini, diharapkan dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur dan menilai kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten dan menentukan langkah serta kebijakan selanjutnya untuk mendukung perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 31 Januari 2020
BPK Perwakilan Provinsi Banten
Kepala Perwakilan,

Agus Khotib
NIP 196808301989031001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah unit organisasi eselon I pada kementerian/lembaga dan unit kerja mandiri yang ditetapkan. Serta ditandatanganinya Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2019, maka perlu disusun Laporan Pencapaian Kinerja Perwakilan Provinsi Banten. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pencapaian tingkat kinerja Perwakilan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja serta masukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penilaian atas pencapaian kinerja dalam SIMAK BPK dengan cara membandingkan realisasi pencapaian suatu Indikator Kerja Utama (IKU) dengan target IKU yang telah ditetapkan pada Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten

BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Satu dari tujuh unit pelaksana tugas pemeriksaan adalah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V. AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Pemerintah Daerah di wilayah

Indonesia Bagian Barat serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, AKN V didukung oleh beberapa satuan kerja (satker) eselon II, yaitu Auditorat VA dan Auditorat VB yang berkedudukan di Kantor Pusat, serta Perwakilan-perwakilan pada masing-masing provinsi. BPK Perwakilan Provinsi Banten merupakan salah satu perwakilan di bawah AKN V yang memiliki tugas dan fungsi pemeriksaan keuangan daerah, yang mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Entitas pemeriksaan di wilayah Perwakilan Banten terdiri dari sembilan entitas pemeriksaan yaitu Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sesuai mandat Undang-Undang, berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawabannya, Perwakilan Banten melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh masing-masing entitas pemeriksaan merupakan asersi terakhir yang disampaikan oleh pemerintah daerah.

Gambar 1.1 Kantor Perwakilan Provinsi Banten

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Banten

Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Banten adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V yang terdiri dari:

1. Subauditorat Banten

Subauditorat Banten mempunyai tugas:

a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

   1) merumuskan rencana kegiatan;
   2) mengusulkan tim pemeriksa;
   3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
   4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
   5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
   6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
   8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
   9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
   10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
   11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan

b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten.

2. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten;

d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Banten dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Banten; dan
f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten; dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Banten terdiri atas:

a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten.
b. Subbagian Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.
c. Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.
d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten; dan
e. Subbagian Hukum melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten.

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Banten

Sumber daya manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Banten posisi per Desember Tahun 2019 berjumlah 77 orang meliputi 8 personil struktural (terdiri dari 1 Kepala Perwakilan, 1 Kepala Subauditorat, 1 Kepala Sekretariat Perwakilan, dan 5 Kepala Subbagian), 28 personil di unit kerja penunjang pendukung dan 41 personil di unit kerja pemeriksaan/auditorat. Berdasarkan jenis kelamin SDM terdiri dari 38 personil wanita dan 39 personil pria.

Komposisi SDM berdasarkan Peran **Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin**

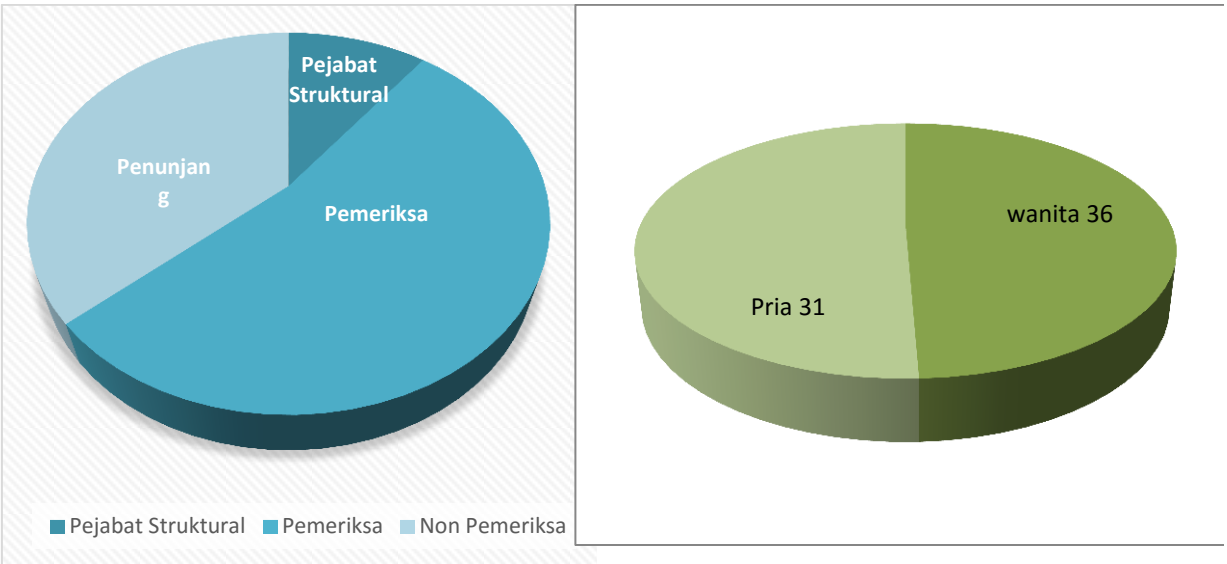

Gambar 1.3 Komposisi SDM BPK Perwakilan Provinsi Banten

E. Anggaran Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Banten

Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Banten awalnya menganggarkan kegiatan sebesar Rp19.254.047.000,00 direvisi menjadi Rp19.600.112.000,00 dikarenakan adanya penambahan anggaran Belanja Pegawai. Anggaran Perwakilan Banten terbagi menjadi tiga program yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.1 Anggaran Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Banten

Program	Anggaran Sebelum Revisi (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Pemeriksaan Keuangan Negara	9.602.595.000,00	9.602.595.000,00
Layanan Sekretariat Perwakilan	1.288.746.000,00	1.288.746.000,00
Layanan Perkantoran dan Overhead	7.977.706.000,00	8.708.771.000,00
Total Anggaran	19.254.047.000	19.600.112.000,00

Rincian anggaran yang mendukung Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangan disajikan dalam **Lampiran 1.**

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Banten

Renstra 2016-2020 yang ditetapkan melalui Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2016 tanggal 28 Desember 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 digunakan sebagai rencana lima tahunan BPK untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan, disertai dengan indikator-indikator pengukurannya. Renstra BPK memuat strategi, kebijakan dan program pemeriksaan yang dapat mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dikaitkan dengan tujuan negara tersebut serta memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pemeriksaan BPK dimaksudkan agar dapat mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara.

Tujuan Strategis BPK adalah 1) Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; 2) meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. BPK menetapkan 11 sasaran strategi (SS) yang digambarkan dalam bentuk peta strategi BPK Wide sebagai berikut.

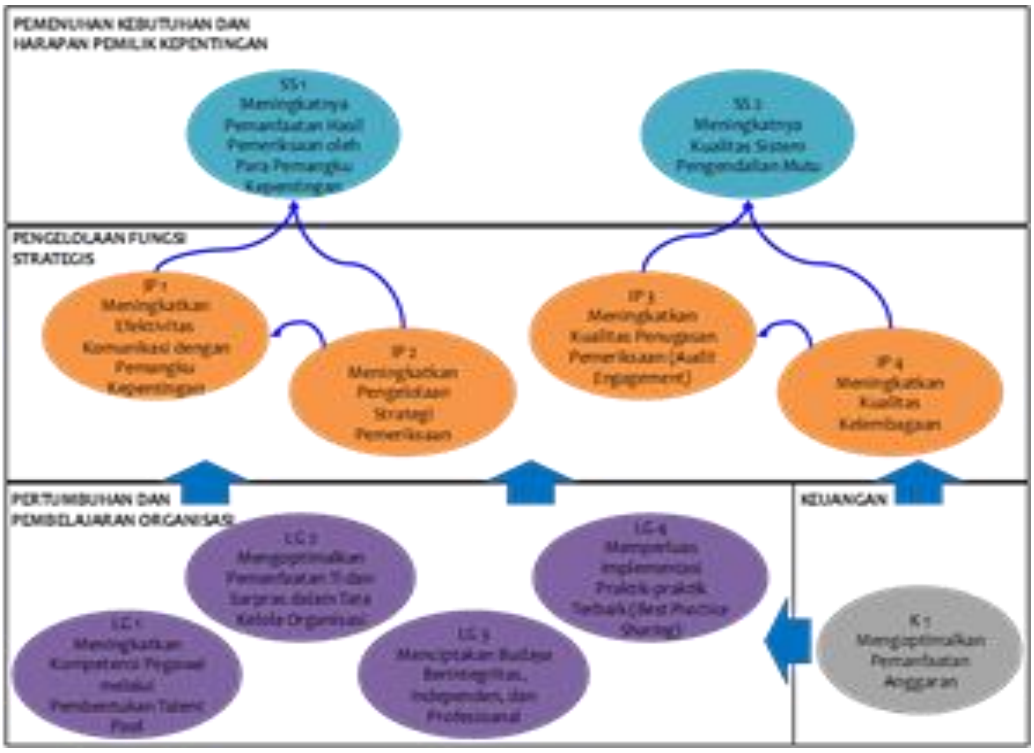

Gambar 2.1 Peta Strategi BPK Wide

Dari 11 sasaran strategis yang ditetapkan dalam BPK Wide, Auditorat Keuangan Negara V menetapkan 7 sasaran stategis yaitu: 1) Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan, 2) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan, 3) Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan, 4) Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara, 5) Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan AKN V, 6) Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan AKN V dan 7) Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan AKN V. Berikut adalah Peta Strategi Auditorat Keuangan Negara V.

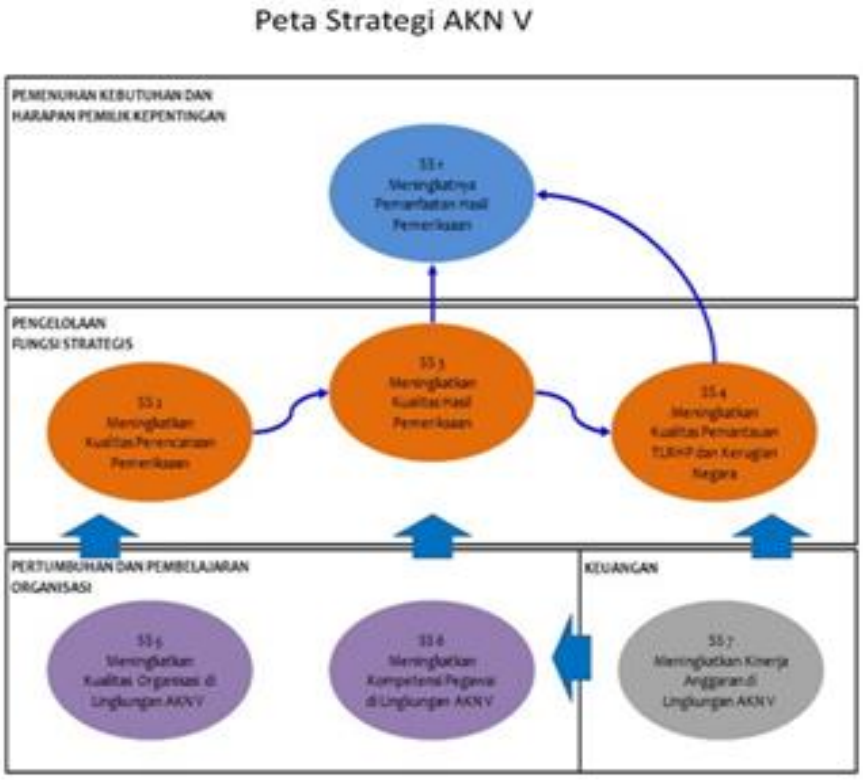

Gambar 2.2 Gambar Peta Strategi AKN V

Perwakilan Banten memiliki peranan strategi dalam mencapai tujuan strategis badan dengan Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan (SS1), Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan (SS2), Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan (SS3) Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara (SS4), Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten (SS5), Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten (SS6), Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten (SS7) . Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten dalam rangka mendukung pencapaian 7 sasaran strategi BPK tersebut dapat digambarkan dalam peta strategi Perwakilan Provinsi Banten berikut ini.

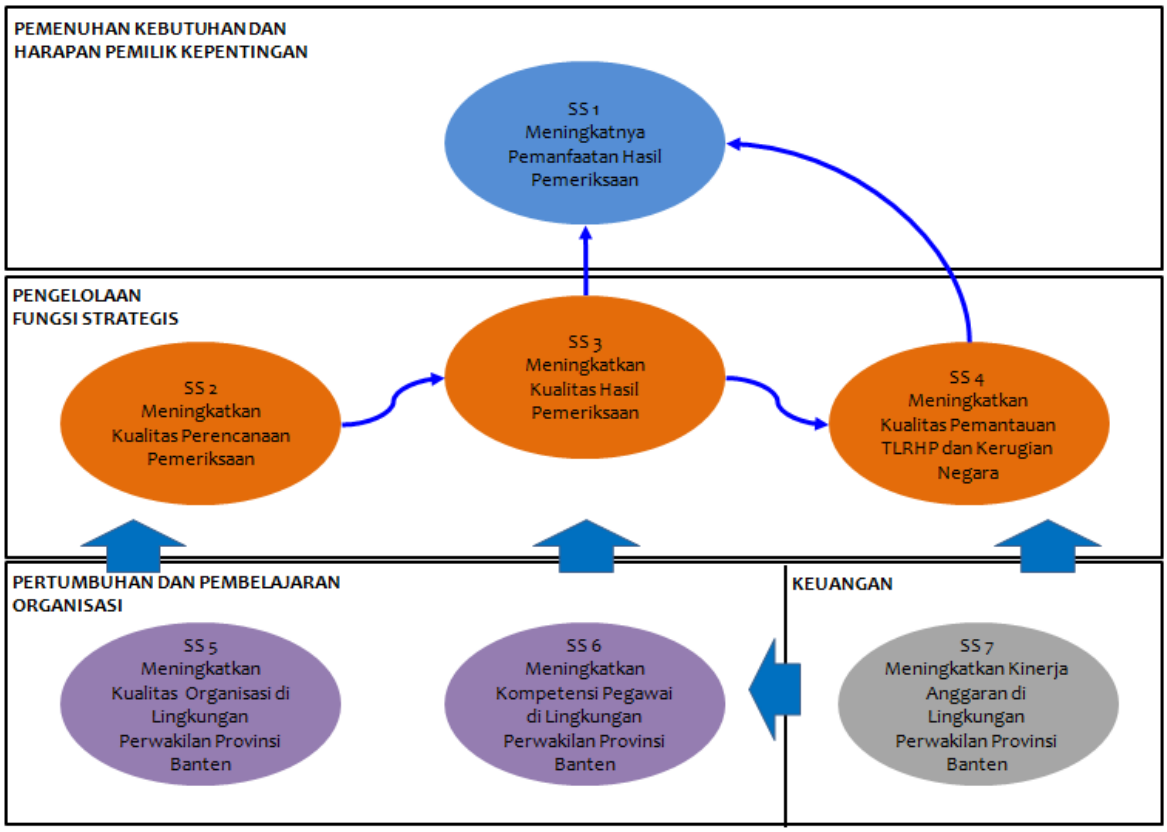

Gambar 2.3 **Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Banten**

Disamping itu dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan strategis dan sasaran strategis, Perwakilan Provinsi Banten menetapkan target kinerja selama lima tahun (2016-2020) pada tujuh sasaran strategis yang masing-masing memiliki ukuran keberhasilannya (IKU) tersaji dalam **Lampiran 2**.

B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU yang dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Banten selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V).
Berdasarkan sasaran strategis yang ada, Rincian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2019 disajikan dalam **Lampiran 3.**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten

Berdasarkan Validasi dari Direktorat PSMK, BPK Perwakilan Provinsi Banten memperoleh skor kinerja Tahun 2019 yaitu sebesar 99,83%. Berikut adalah pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2019 :

SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan diukur melalui 4 IKU, yaitu IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan target Tahun 2019 sebesar 75,00%, IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH dengan target Tahun 2019 sebesar 100,00%, IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli dengan target Tahun 2019 sebesar 100,00%, dan IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang dengan Tahun 2019 yaitu sebanyak 1 usulan bahan pendapat yang disampaikan.

Adapun realisasi dan nilai IKU masing-masing upaya peningkatan fungsi manajemen pemeriksaan tersebut pada Tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut.

1. Realisasi IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2019 adalah sebesar 77,69% atau melebihi target Tahun 2019 sebesar 75,00%.

   IKU 1.1 ini menunjukkan intensitas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dalam periode lima tahun terakhir yang diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan daerah. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan

Tabel 3.1 Realisasi IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
SS.1	**Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan**						
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	103,59	75,00%	77,69%	77,25%	65,57%	51,20%

Realisasi atas IKU 1.1 merupakan data pantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan kepada auditee dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2019 sesuai pantauan pada Aplikasi SMP sampai dengan 27 Januari 2020.

Selama tahun 2005-2019 BPK Perwakilan Provinsi Banten telah memberikan 7.711 rekomendasi sebesar Rp724.587.294.559,99 kepada sembilan entitas, dengan Status Tindak Lanjut Rekomendasi sebagai berikut:

a) Selesai Ditindaklanjuti sebanyak 5.986 rekomendasi dengan nilai Rp323.129.240.712,95 (status 1);
b) Belum Sesuai sebanyak 1.089 rekomendasi dengan nilai Rp 323.129.240.712,95 (status 2);
c) Belum Ditindaklanjuti sebanyak 631 rekomendasi dengan nilai Rp74.778.217.030,12 (status 3); dan
d) Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah sebanyak 5 rekomendasi dengan nilai Rp0 (status 4).

Rekapitulasi Tindak Lanjut lebih rinci disajikan pada **Lampiran 4**.

Keberhasilan pencapaian IKU 1.1 ini karena pada Tahun 2019 Perwakilan Provinsi Banten menerapkan Surat Edaran Kebijakan Anggota V BPK terkait Kebijakan Percepatan Penyelesaian TLRHP yaitu dengan menerapkan hal-hal berikut:

a. inventarisasi TLRHP yang tidak bergerak/stagnan;
b. mengintensifkan komunikasi penyelesaian TLRHP;
c. TLRHP status 2 dan 3 namun secara substansif sudah ditindaklanjuti;
d. Memperjelas rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
e. Penulisan nama secara lengkap pihak yang bertanggungjawab dalam matriks Laporan Hasil Pemantauan TLRHP.

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (status 1 dan status 4) sebesar 81,50% atau sama lebih besar daripada realisasi Triwulan I Tahun 2019 yaitu sebesar 77,25%. Dengan demikian, nilai IKU 1.1 Tahun 2019 adalah sebesar 103,59.

2. Realisasi IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH Tahun 2019 adalah sebesar 100,00% atau sama dengan target Tahun 2019 sebesar 100,00%.

   IKU ini menunjukkan kontribusi BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi. Setiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke Ditama Binbangkum pada tahun berjalan untuk disetujui dan disampaikan ke IPH. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas temuan berindikasi tindak pidana untuk dapat segera ditindaklanjuti. Apabila belum terdapat temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dari LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada IPH, Perwakilan tetap mendapat nilai sebesar 100,00%.

Tabel 3.2 Realisasi IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
SS.1	**Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan**						
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke APH	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

Selama Tahun 2019, Perwakilan Provinsi Banten tidak pernah menyampaikan temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana ke Ditama Binbangkum untuk dapat disetujui dan disampaikan ke IPH. IKU 1.2 merupakan IKU pelengkap yang berarti apabila tidak

terdapat realisasi IKU maka tidak mempengaruhi skor kinerja. Dengan demikian nilai IKU 1.2 Tahun 2019 adalah sebesar 100,00.

3. Realisasi IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan dan Pemberian Keterangan Ahli Tahun 2019 adalah sebesar 100,00% atau sama dengan target Tahun 2019 sebesar 100,00%.

   IKU ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan yang meliputi perhitungan kerugian negara/daerah (yang dinyatakan memenuhi syarat oleh BPK). IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan terkait Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli. Apabila belum terdapat permintaan perhitungan kerugian negara, Perwakilan tetap mendapat nilai sebesar 100,00%.

Tabel 3.3 Realisasi IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
SS.1	**Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan**						
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Selama Tahun 2019, tidak ada permintaan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan permintaan Pemberian Keterangan Ahli yang disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Banten. IKU 1.3 merupakan IKU pelengkap yang berarti apabila tidak terdapat realisasi IKU maka tidak mempengaruhi skor kinerja. Dengan demikian, nilai IKU 1.3 Tahun 2019 adalah sebesar 100,00.

4. Realisasi IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang Tahun 2019 adalah sebesar 1 atau sama dengan target Tahun 2019 yaitu sebanyak 1 usulan.

   IKU ini menunjukkan tingkat produktivitas terkait pelaksanaan tugas dalam hal memberikan bahan pertimbangan dan bahan pendapat BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. IKU ini bertujuan untuk mengukur kontribusi Auditorat/Perwakilan terkait pelaksanaan tugas/kewenangan BPK memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

Tabel 3.4 Realisasi IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
SS.1	**Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan**						
1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	100,00	1	1	1	2	2

Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Banten telah menyampaikan usulan bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang dengan judul Aset dan Pemekarannya. Dengan demikian nilai IKU 1.4 Tahun 2019 adalah sebesar 0,00.

Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan diukur melalui 3 IK, yaitu IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan dengan target Tahun 2019 sebesar 95.00%, IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP dengan target Tahun 2019 sebesar 30,00%, dan IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP dengan target Tahun 2019 sebesar 100,00%.

Adapun realisasi dan nilai IK masing-masing upaya peningkatan fungsi Kualitas Perencanaan Pemeriksaan tersebut pada Tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut.

1. Realisasi IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan Tahun 2019 telah mencapai 100,00% atau sudah melampaui target Tahun 2019 sebesar 95,00%.

   IK ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk tema dan fokus pemeriksaan. IK bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang mengacu pada strategi pemeriksaan BPK.

Tabel 3.5 Realisasi IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan							
1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	105,00	95,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%

Selama Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Banten melakukan 9 pemeriksaan laporan keuangan, 6 pemeriksaan kinerja dan 7 pemeriksaan krpatuhan dengan Tema, Fokus dan TSAO yang sejalan dengan Renstra BPK. Rincian tema, fokus dan TSAO disajikan dalam **lampiran 5**. Dengan demikian, nilai IK 1.1.1 Tahun 2019 adalah sebesar 105,00.

2. Realisasi IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP Tahun 2019 telah mencapai 30,00% atau sama dengan target Tahun 2019 sebesar 30,00%.

   IK ini menunjukkan tingkat proporsi kegiatan pemeriksaan kinerja yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah LHP pemeriksaan kinerja terhadap jumlah seluruh LHP yang dihasilkan.

Tabel 3.6 Realisasi IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan							
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	100	30%	30%	20,00%	23,81%	21,74%

Selama Tahun 2019, BPK Perwakilan Banten telah menerbitkan 6 LHP Kinerja dari total 20 LHP, yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Penyediaan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun Anggaran 2019 pada PDAM Tirta Kerta Raharja dan Instansi Terkait Lainnya di Tangerang;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Instansi Terkait Lainnya di Pandeglang;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatak Kualitas Pembelajaran dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang serta Instansi Terkait Lainnya di Tigaraksa;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d 2018 pada Pemerintah Kabupaten Serang dan Instansi Terkait Lainnya di Serang;
5. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d 2018 pada Pemerintah Kota Cilegon dan Instansi Terkait Lainnya di Cilegon; dan
6. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Wilayah Provinsi Banten dan Instansi Terkait.

Dengan demikian, nilai IK 1.1.2 Tahun 2019 sebesar 100,00.

3. Realisasi IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP Tahun 2019 sebesar 100,00% atau sama dengan target Tahun 2019 sebesar 100,00%.

   IK ini menunjukkan menunjukkan tingkat evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh satker pemeriksaan.

Tabel 3.7 Realisasi IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan							
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100	100%	100%	100%	-	82,00%

Selama Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Banten telah menerbitkan LHP yang telah sesuai antara Tema, Fokus, TSAO, Tujuan Pemeriksaan serta Kesimpulan. Rincian IK 1.1.3 dapat dilihat pada **Lampiran 6**. Dengan demikian, nilai IK 1.1.3 sebesar 100,00.

Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk meningkatkan Kualitas Hasil Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara diukur melalui 3 IK, yaitu IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan target Tahun 2019 sebesar 100,00%, IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara dengan target Tahun 2019 sebesar 9, dan IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang dengan target Tahun 2019 sebesar 100,00%.

Adapun realisasi dan nilai IK masing-masing upaya peningkatan fungsi Kualitas Hasil Pemeriksaan tersebut pada Tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut.

1. Realisasi IKU 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2019 adalah 100,00% atau sama dengan target Tahun 2019 sebesar 100,00%.

   IK ini menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Tabel 3.8 Realisasi IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara							
1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%

   Pada Tahun 2019, Perwakilan Provinsi Banten telah melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sebanyak dua kali yaitu pada Semester I (17 s.d. 21 Juni 2019) dan Semester II (16 s.d. 18 Desember 2019) Tahun 2019 pada Sembilan entitas. Dengan demikian, nilai IK 1.2.1 Tahun 2019 adalah sebesar 100,00.

2. Realisasi IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Tahun 2019 adalah 18 laporan atau sama dengan target Tahun 2019 sebesar 18 laporan.
   Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan yang disusun oleh Auditorat/Perwakilan untuk disampaikan kepada Ditama Revbang. Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendaharawan, PNS non bendaharawan dan pihak ketiga.

Tabel 3.9 Realisasi IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara							
1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	100,00	18	18	18	18	18

   Selama Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Banten telah menerbitkan Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Semester I dan Semester II Tahun 2019 pada sembilan entitas. Dengan demikian, nilai IKU 1.2.2 Tahun 2019 adalah 100,00.

3. Realisasi IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang adalah 100,00% atau sama dengan target Tahun 2019 sebesar 100,00%.

   Penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara oleh Auditorat/Perwakilan ke Dit. EPP adalah dalam rangka penyusunan bahan IHPS. Penyampaian yang dimaksud adalah penyampaian laporan secara fisik dan melalui input ke SIKAD.

Tabel 3.10 Realisasi IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara							
1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Selama Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah menyampaikan Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Semester I dan Semester II Tahun 2019 ke Ditama Revbang serta telah melakukan penginputan ke Aplikasi SIKAD. Dengan demikian, nilai IKU 1.2.3 Tahun 2019 adalah 100,00.

Startegi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk meningkatkan fungsi Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan diukur melalui 4 IK, yaitu IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) dengan target Tahun 2019 sebesar 100,00%, IK 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK dengan target Tahun 2019I Tahun 2019 sebesar 3,90, IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP dengan target Tahun 2019 sebesar 100,00%, dan IK 2.1.4 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang dengan target Tahun 2019I Tahun 2019 sebesar 100,00%.

Adapun realisasi dan nilai IK masing-masing upaya peningkatan fungsi Kualitas Hasil Pemeriksaan tersebut pada Tahun 2019I Tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut.

1. Realisasi IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Tahun 2019 adalah sebesar 100,00% atau sama dengan target Tahun 2019 sebesar 100,00%.

   IK ini menunjukkan sejauh mana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan dan Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

Tabel 3.11 Realisasi IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan Quality Assurance (QA) Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan							
2.1.1	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Selama Tahun 2019, telah dilakukan reviu atas pelaporan pemeriksaan sehingga pemenuhan QC oleh PFP dan QA oleh PSP untuk seluruh LHP yang diterbitkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Dengan demikian nilai IK 2.1.1 Tahun 2019 adalah sebesar 100,00.

2. Realisasi IK 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK Tahun 2019 adalah sebesar 4,42 atau melampaui dengan target Tahun 2019 sebesar 3,90.

   Indikator tingkat kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Banten dalam menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK, yang diukur berdasarkan persepsi auditee melalui survei tingkat kepuasan. Dimensi yang diukur mencakup Integritas, Independensi, Profesionalisme.

Tabel 3.12 Realisasi IK 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan							
2.1.2	Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK	105,00	3,90	4,42	4,63	4,50	4,32

   Selama Tahun 2019 telah diperoleh indeks hasil kepuasan auditee atas kinerja Pemeriksa BPK pada pemeriksaan yang telah dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke pemerintah daerah. Dengan demikian nilai IK 2.1.2 Tahun 2019 adalah sebesar 105,00.

3. Realisasi IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Tahun 2019 adalah 100,00% atau sama dengan target Tahun 2019 sebesar 100,00%.

   Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Ketepatan waktu penyampaian LHP untuk pemeriksaan keuangan diatur dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2004, sementara untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu didasarkan pada perencanaan penyelesaian yang dinyatakan dalam program pemeriksaan.

Tabel 3.13 Realisasi IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Tahun 2019I Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan							
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

   Selama Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah telah menerbitkan 29 LHP yang terdiri dari sembilan LHP atas LKPD, sembilan LHP atas LPJ Banparpol, enam LHP Kinerja, dan lima LHP Kepatuhan. Dengan demikian nilai IK 2.1.3 Tahun 2019 adalah sebesar 100,00.

4. Realisasi IK 2.1.4 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang adalah sebesar 100,00% atau sama dengan target Tahun 2019 sebesar 100,00%.

   IK ini menunjukkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai dengan SPKN, yang mensyaratkan bahwa tidak ada LHP yang digugat dan dinyatakan kalah di pengadilan. Apabila belum terdapat LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang, Perwakilan tetap mendapat nilai sebesar 100,00%.

Tabel 3.14 Realisasi IK 2.1.4 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan							
2.1.4	Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-

Sampai dengan Tahun 2019, tidak terdapat LHP yang diterbitkan oleh Perwakilan Provinsi Banten yang digugat. Dengan demikian nilai IK 2.1.4 Tahun 2019 adalah sebesar 100,00.

Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK RI Perwakilan.

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan diukur melalui 3 IK, yaitu IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK dengan target Tahun 2019 sebesar 5,00 , IK 3.1.2 Indeks Implementasi nilai dasar BPK dengan target Tahun 2019 sebesar 5,00, dan IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin dengan target Tahun 2019 sebesar 100,00%.

Adapun realisasi dan nilai IK masing-masing upaya Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK RI Perwakilan tersebut pada Tahun 2019I Tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut.

1. Realisasi IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK Tahun 2019I Tahun 2019 adalah 4,42 atau lebih rendah dari target Tahun 2019 sebesar 0,00.

   IKU ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survey. IKU ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK dan bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

Tabel 3.16 Realisasi IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 3.1.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK RI Perwakilan							
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	88,40	5,00	4,42	3,67	-	-

   Penilaian Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK, belum dilakukan oleh Direktorat PSMK. Dengan demikian, nilai IK 3.1.1 sebesar 88,40.

2. Realisasi IK 3.1.2 Indeks Implementasi nilai dasar BPK dengan target Tahun 2019 adalah 4,64 atau lebih rendah dari target Tahun 2019 sebesar 5,00

   IK ini mengukur tingkat penerapan nilai-nilai dasar BPK sebagai budaya organisasi oleh seluruh komponen BPK. IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Nilai dasar BPK diterapkan dalam organisasi.

Tabel 3.17 Realisasi IK 3.1.2 Indeks Implementasi nilai dasar BPK Tahun 2019I Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 3.1.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK RI Perwakilan							
3.1.2	Indeks Implementasi nilai dasar BPK dengan target Tahun 2019I Tahun 2019	92,80	5,00	4,64	4,55	-	-

Penilaian Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Indeks Implementasi nilai dasar BPK, belum dilakukan oleh Direktorat PSMK. Dengan demikian, nilai IK 3.1.1 sebesar 92,80.

3. Realisasi IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin telah mencapai 100,00% atau sama dengan target Tahun 2019 sebesar 100,00%.

   IK ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai.

Tabel 3.18 Realisasi IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin Tahun 2019I Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 3.1.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK RI Perwakilan							
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-

Selama Tahun 2019, tidak terdapat pejabat dan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Banten yang memperoleh pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Disiplin. Dengan demikian, nilai IK 3.1.7 Tahun 2019 adalah sebesar 100,00.

<u>Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan</u>

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan diukur melalui 7 IK, yaitu IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten dengan target Tahun 2019 senilai AA, IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dengan target Tahun 2019 sebesar 95,00%, IK 3.2.3 Jumlah *best-practice* yang disusun dengan target Tahun 2019 sebesar 1, IK 3.2.4 Tingkat Penerapan *best-practice* dengan target Tahun 2019 sebesar 100,00%, 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan output dan kinerja dengan target Tahun 2019 sebesar 100,00%, IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan target Tahun 2019 sebesar 93,00%, dan IK 3.2.7 Jumlah Media Relation yang dilaksanakan dengan target Tahun 2019 adalah 1.

Adapun realisasi dan nilai IK masing-masing upaya meningkatkan kualitas organisasi di Lingkungan Perwakilan tersebut pada Tahun 2019I Tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut.

1. Realisasi IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2019I Tahun 2019 adalah A atau lebih rendah dari target Tahun 2019 yaitu AA.

   Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK.

Tabel 3.19 Realisasi IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan							
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten	90,00	AA	A	BB	A	A

Pada Tahun 2019 Perwakilan Provinsi Banten telah memperoleh Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja. Dengan demikian, nilai IK 3.2.1 Tahun 2019 adalah sebesar 90,00.

2. Realisasi IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2019 yaitu sebesar 98,18% atau melebihi target Tahun 2019 yaitu sebesar 95,00%.

   BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (email, eDrive dan portal), layanan kelembagaan (SISDM) dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, eAudit dan SiPTL). Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal. IKU ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan TIK dalam rangka mendorong *IT culture* di BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Tabel 3.20 Realisasi IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 3.1 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan							
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	103,35	95,00%	98,18%	96,97 %	74,93%	75,43%

Pada Tahun 2019, Perwakilan Provinsi Banten memperoleh nilai 98,18% untuk Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dari Biro TI. Dengan demikian, nilai IK 3.1.2 Tahun 2019 adalah sebesar 103,35.

3. Realisasi IK 3.2.3 Jumlah *Best-Practice* yang Disusun Tahun 2019 adalah 1 atau sama dengan target Tahun 2019 sebesar 1.

   Best-practice adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi *best-practice*.

Tabel 3.21 Realisasi IK 3.2.3 Jumlah *Best-Practice* yang Disusun Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan							
3.2.3	Jumlah *Best-Practice yang Disusun*	100,00	1	1	0	0	0

Selama Tahun 2019, Perwakilan Provinsi Banten telah menyusun *best-practice yaitu* pemanfaatan fitur BIDIK pada Portal BPK. Dengan demikian, nilai IK 3.2.3 Tahun 2019 adalah sebesar 100.00.

4. Realisasi IK 3.2.4 Tingkat Penerapan best-practice Tahun 2019 yang telah dilaksanakan sebesar 100,00% sama dengan target Tahun 2019 sebesar 100,00%.

   Best-practice yang harus diterapkan adalah best-practice ditetapkan dan telah dilengkapi dengan pedoman pelaksanaannya. IK ini bertujuan untuk mendorong penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja organisasi dalam kerangka *knowledge management.*

Tabel 3.22 Realisasi IK 3.2.4 Tingkat Penerapan Best-Practice Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan							
3.2.4	Tingkat Penerapan *Best-Practice*	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00

Untuk Tahun 2019, Perwakilan Provinsi Banten telah menerapkan/ menduplikasi *best-practice* yaitu dengan membuat fitur di portal yang berisi monitoring berita untuk dimanfaatkan sebagai bahan pemeriksaan. Dengan demikian, nilai IK 3.2.4 Tahun 2019 adalah sebesar 100,00.

5. Realisasi IK 3.2.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2019 telah mencapai 100,00% atau sudah memenuhi target Tahun 2019 sebesar 100,00%.

   Ketepatan waktu penyampaikan Laporan Kinerja triwulanan adalah sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekjen No 320/2011 terkait Pengelolaan Pengukuran Kinerja berbasis SIMAK, yakni 1 bulan setelah triwulan pengukuran berakhir. Sedangkan, Ketepatan waktu penyampaian laporan output adalah penyampaian laporan bulanan sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekjen No 545/2013 tentang POS Penyusunan Laporan Kegiatan Pelaksana BPK yakni hari kerja ke-10 di bulan berikutnya IK ini bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja tahunan, Laporan Kinerja triwulanan dan laporan output secara tepat waktu.

Tabel 3.23 Realisasi IK 3.2.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan							
3.2.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %

Sampai dengan Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Banten sudah menyampaikan satu Laporan Kinerja Tahun 2018, 3 Laporan Triwulan dan 12 laporan pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat PSMK secara tepat waktu. Dengan demikian, nilai IK 3.2.5 Tahun 2019 adalah sebesar 100,00.

6. Realisasi IK 3.2.6 Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan Tahun 2019 sebesar 1,60 atau melebihi target Tahun 2019 sebesar 1,00.

   Kegiatan *media relation* merupakan salah satu bentuk kegiatan hubungan dan kerjasama dengan media massa. Kegiatan *media relation* dapat diselenggarakan dalam bentuk: (1)

Sosialisasi kepada wartawan mengenai hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dan (2) Pelatihan (*workshop*) bagi para wartawan dalam proses pembelajaran mengenai hal-hal yang terkait dengan teknis pemeriksaan.

Tabel 3.25 Realisasi IK 3.2.7 Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan Tahun 2019I Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan							
3.2.6	Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	105,00	1,00	1,60	1,6	3,20	2,60

Sampai dengan Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan *media relation* yaitu menerbitkan dua siaran pers. Dengan demikian nilai IK 3.2.7 Tahun 2019 adalah sebesar 105,00.

7. Realisasi IK 3.2.7 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Tahun 2019 telah mencapai 93,99% atau sudah melampaui target Tahun 2019 sebesar 93,00%.

   Standar sarana dan prasarana kerja merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK, untuk terwujudnya suatu pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK. Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja adalah upaya yang dilakukan oleh satuan kerja untuk memenuhi standar sarana dan prasarana kerja sesuai Panduan Standar Sarana dan Prasarana Kerja BPK.

Tabel 3.24 Realisasi IK 3.2.7 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 3.1. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan							
3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	101,06	93,00%	93,99%	93%	93,85%	93,85%

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Banten sudah melaksanakan pemenuhan standar sarana dan prasarana mencapai 93,99% atau telah melampaui target Tahun 2019 sebesar 93,00%, Dengan demikian nilai IK 3.2.6 Tahun 2019 adalah sebesar 101,06.

Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan diukur melalui 2 IK, yaitu IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa dengan target 2018 sebesar 100,00%, dan IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) dengan target Tahun 2019 sebesar 100,00%.

1. Realisasi IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa Tahun 2019I Tahun 2019 sebesar 86,49% atau di bawah target Tahun 2019 sebesar 100,00%.

   Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan

yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai non pemeriksa, yakni staf maupun pejabat struktural pada dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun.

Tabel 3.26 Realisasi IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 3.2 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan							
3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	86,49	100,00%	86,49%	76,32%	89,47%	97,56%

Selama Tahun 2019, pemeriksa yang telah memenuhi standar jam pelatihan adalah sebanyak 32 pemeriksa dari 37 pemeriksa. Dengan demikian, nilai IK 3.3.1 Tahun 2019 adalah sebesar 86,49.

2. Realisasi IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) Tahun 2019 sebesar 88,57% atau di bawah target sebesar 100%.

   Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai non pemeriksa, yakni staf maupun pejabat struktural pada satker dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Tabel 3.27 Realisasi IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 3.2. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan							
3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	88,57	100,00%	88,57%	82,76%	55,54%	48,84%

Selama Tahun 2019, pegawai telah memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial dalah sebanyak 28 pegawai dari 25 pegawai. Dengan demikian, nilai IK 3.3.2 Tahun 2019 adalah sebesar 88,57.

<u>Strategi 3.4 Tingkat Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan</u>

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan diukur melalui satu IK, yaitu IK 3.4.1 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan dengan target Tahun 2019I Tahun 2019 sebesar 80,00%.

Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK 249 tahun 2011, dinilai dari empat indikator, yaitu: (1) penyerapan anggaran, (2) konsistensi antara perencanaan dan implementasi, (3) pencapaian keluaran, dan (4) efisiensi.

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

Realisasi IK 3.3.1 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Tahun 2019I Tahun 2019 telah mencapai 86,49% telah melebihi target Tahun 2019 sebesar 50,00%.

Tabel 3.28 Realisasi IK 3.4.1 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 3.3 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Banten							
3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	105	80,00%	88,50%	86,42%	85,68%	83,39%

Pada Tahun 2019, tingkat kinerja implementasi anggaran adalah sebesar 88,50% yang terdiri dari : Penyerapan Anggaran sebesar 95,03%, Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi sebesar 99,49%, Pencapaian Keluaran sebesar 99,69% dan Efisiensi sebesar 62,27% . Dengan demikian nilai IK 3.4.1 Tahun 2019 adalah sebesar 105,10.

Rekapitulasi target dan realisasi 2019, perbandingan realisasi capaian tiga tahun terakhir, dan perbandingan realisasi dengan target lima tahunan tersaji dalam **Lampiran 7, Lampiran 8, dan Lampiran 9.**

B. Realisasi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Banten

Realisasi Belanja BPK Perwakilan Provinsi Banten sampai dengan Desember Tahun 2019 adalah sebesar Rp18.665.939.970,00 dari anggaran belanja sebesar Rp19.600.112.000,00. Rincian anggaran belanja TA 2019 dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Program Tahun 2019

Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pemeriksaan Keuangan Negara	9,602,595,000.00	3,766,024,272.00	39,22%
Layanan Kesekretariatan	1,288,746,000.00	445,873,084.00	34,60%
Layanan Perkantoran dan Layanan Internal	7,977,706,000.00	3,408,545,862.00	40,76%
Jumlah	**19,254,047,000.00**	**7,620,443,218.00**	**39,58%**

Realisasi anggaran yang mendukung Realisasi Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	14.564.000,00	14.024.391,00

Indikator Kinerja		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2.1.1	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan	404.889.000,00	383.425.720,00
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli		
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi		
1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan		
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP		
1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP		
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	73.018.000,00	58.447.595,00
2.1.1	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan	855.813.000,00	747.440.049,00
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan		
2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK		
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP		
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	7.737.210.000,00	7.148.821.556,00
2.1.1	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan		
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan		
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH		
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli		
1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan		
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP		
2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK		
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP		
1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	493.556.000,00	396.017.145,00
1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara		
1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang		
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	23.545.000,00	18.436.718,00
1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	1.288.746.000,00	1.273.774.107,00
3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK		
3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa		
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja		
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi		
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli		
3.2.3	Jumlah Best Practice yang Disusun		
3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice		
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin		
3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)		
3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana		
3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan		
3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja		
3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	385.000.000,00	381.079.500,00

Indikator Kinerja		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2.1.1	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan	8.323.771.000,00	8.244.473.189,00
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP		
2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK		
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK		
3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK		
3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa		
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja		
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi		
1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan		
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP		
2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK		
1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		
1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara		
3.2.3	Jumlah Best Practice yang Disusun		
3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice		
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin		
3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana		
3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)		
3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran		
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP		
1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang		
3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja		
3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan		
Total		**19.600.112.000,00**	**18.665.939.970,00**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten merupakan sumbangan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 pada AKN V sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah mencapai skor kinerja Tahun 2019 yaitu sebesar 99,83. beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain:

1. IK 3.1.1. Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar
2. IK 3.1.2. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK,
3. IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja,
4. IK 3.3.1. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
5. IK 3.3.2. Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

Upaya-upaya yang akan dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten dalam rangka pemenuhan target pada tahun berikutnya dengan cara;

1. Mengadakan diseminasi atau pengarahan terhadap pegawai/ pemeriksa agar lebih memahami Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK serta dapat menerapkannya. Selain itu akan diusahakan dengan mempublikasikan informasi melalui media seperti spanduk/ banner;
2. Menindaklanjuti hasil evaluasi laporan kinerja sesuai dengan rekomendasi dari Inspektur Utama;
3. Menginstruksikan para atasan langsung agar merekomendasikan stafnya yang tidak sedang bertugas pemeriksaan, atau tugas lainnya untuk mendaftar diklat sesuai kalender dari Badiklat.
4. Berkoordinasi dengan Badan Diklat PKN untuk mengadakan diklat di kantor perwakilan baik untuk pemeriksa atau pegawai penunjang.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Banten ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK

Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja
BPK Perwakilan Provinsi Banten

Strategi	Anggaran	Indikator Kinerja		Target
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	Rp 2.933.786.000	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
		IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	100%
Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	Rp 5.058.178.000	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%
		IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	30%
		IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%
Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	Rp 1.414.905.000	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
		IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	18
		IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	Rp 4.377.315.000	IK 2.1.1	Pemenuhan *Quality Control* dan *Quality Assurance* Pemeriksaan	100%
		IK 2.1.2	Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,90
		IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
		IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
Strategi 3.1 - Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp 1.630.712.000	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,00
		IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00
		IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp 2.882.372.000	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA
		IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%
		IK 3.2.3	Jumlah *Best Practice* yang Disusun	1
		IK 3.2.4	Tingkat Penerapan *Best Practice*	100%
		IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
		IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	93%
		IK 3.2.7	Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan	1
Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp 813.321.000	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
		IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp 143.458.000	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%

Program Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara **Rp19.254.047.000**

Lampiran 2

Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten 2016-2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
			2016	2017	2018	2019	2020
SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	80%
	IKU 1.2	Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3.7	3.8	3.9	4.0
	IKU 1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	1
SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	86%	87%	88%	89%
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	18%	18%	18%	18%	18%
	IKU 2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3.2	Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	18	18	18	18	18
	IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%

Lampiran 2

Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten 2016-2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
		Kerugian Negara ke Ditama Revbang					
SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Banten	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten	A	A	A	A	A
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 5.3	Persentase penyusunan *best-practice*	0%	0%	0%	0%	0%
	IKU 5.4	Persentase penyebaran *best-practice*	0%	0%	0%	0%	0%
	IK 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%
	IK 5.6	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%
	IK 5.7	Jumlah *media relation* yang dilaksanakan	2	2	2	2	2
	IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	96%	97%	98%	99%
SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Banten	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
	IK 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100%	100%	100%
SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Banten	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Banten	90%	92%	94%	95%	96%

Lampiran 3

TARGET PENCAPAIAN KINERJA SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA TA 2019

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2018
(1)	(2)		(3)
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	30%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	18
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan *Quality Control* dan *Quality Assurance* Pemeriksaan	100%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK RI Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar	5
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	85%
	IK 3.2.3	Jumlah *Best-Practice* yang Disusun	1
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan *Best-Practice*	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
	IK 3.2.6	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	1
	IK 3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	93%
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pegawai Menejerial	100%

Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%

Lampiran 4

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Periode : Triwulan IV Tahun 2019

NO	Entitas	Temuan		Rekomendasi		Status Tindak Lanjut Rekomendasi							
						TS		TBS		BT		TDT	
		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1	**Prov Banten**	**649**	**485.569.700.953**	**1.368**	**352.609.328.871**	**996**	**101.947.202.268**	**225**	**218.570.605.937**	**147**	**32.091.520.667**	**-**	**-**
	Prov Banten	19	IDR 10.491.354.334,17	32	IDR 3.621.211.645,17	26	IDR 1.382.666.599,58	2	IDR 742.244.938,00	4	IDR 1.496.300.107,59	0	IDR 0,00
		56	IDR 5.195.366.104,51	109	IDR 3.062.197.713,28	107	IDR 2.973.693.113,28	2	IDR 88.504.600,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		68	IDR 15.119.402.811,42	99	IDR 10.515.990.043,97	66	IDR 9.421.426.290,47	16	IDR 919.139.250,00	17	IDR 175.424.503,50	0	IDR 0,00
		29	IDR 360.295.185,00	66	IDR 331.956.183,00	56	IDR 331.956.183,00	4	IDR 0,00	6	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		61	IDR 17.625.929.645,61	141	IDR 16.199.611.254,61	102	IDR 11.144.788.342,86	29	IDR 5.054.822.911,75	10	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		23	IDR 6.579.928.966,35	46	IDR 6.473.348.502,77	35	IDR 6.444.860.165,57	3	IDR 0,00	8	IDR 28.488.337,20	0	IDR 0,00
		34	IDR 9.010.116.228,27	61	IDR 3.176.935.619,67	45	IDR 3.173.488.999,67	7	IDR 3.446.620,00	9	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		56	IDR 5.251.166.431,16	111	IDR 4.121.721.824,06	66	IDR 2.879.190.853,08	10	IDR 745.382.432,98	35	IDR 497.148.538,00	0	IDR 0,00
		56	IDR 86.631.701.143,86	122	IDR 13.180.433.523,87	99	IDR 9.994.668.971,66	16	IDR 3.185.764.552,21	7	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		72	IDR 247.537.125.144,07	195	IDR 234.715.266.974,92	118	IDR 11.707.254.792,49	63	IDR 198.389.809.077,33	14	IDR 24.618.203.105,10	0	IDR 0,00
		54	IDR 20.570.260.738,13	154	IDR 18.546.723.050,20	126	IDR 10.763.663.412,32	28	IDR 7.783.059.637,88	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		52	IDR 34.253.103.825,45	120	IDR 24.084.475.346,00	93	IDR 24.084.475.346,00	25	IDR 0,00	2	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		32	IDR 19.146.841.355,81	53	IDR 7.001.534.016,51	42	IDR 5.755.418.618,31	11	IDR 1.246.115.398,20	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		12	IDR 1.084.518.298,96	14	IDR 865.332.432,80	10	IDR 225.793.154,33	2	IDR 0,00	2	IDR 639.539.278,47	0	IDR 0,00
		25	IDR 6.712.590.740,42	45	IDR 6.712.590.740,42	5	IDR 1.663.857.425,05	7	IDR 412.316.518,26	33	IDR 4.636.416.797,11	0	IDR 0,00
2	**Kabupaten Lebak**	366	81.431.522.368	725	78.242.656.084	621	64.541.023.951	90	13.510.689.524	12	190.942.610	2	0
		16	IDR 7.822.099.406,98	32	IDR 6.419.199.406,98	17	IDR 1.495.725.717,80	14	IDR 4.923.473.689,18	1	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		31	IDR 1.170.794.504,54	67	IDR 1.170.794.504,24	59	IDR 356.148.112,60	7	IDR 780.521.089,64	1	IDR 34.125.302,00	0	IDR 0,00
		27	IDR 4.805.561.468,23	49	IDR 4.725.081.834,82	42	IDR 4.563.337.330,83	7	IDR 161.744.503,99	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		38	IDR 950.649.464,43	68	IDR 911.635.464,43	57	IDR 331.346.790,00	10	IDR 580.288.674,43	0	IDR 0,00	1	IDR 0,00
		32	IDR 2.741.826.898,14	77	IDR 2.654.186.907,82	69	IDR 2.246.579.809,32	6	IDR 407.607.098,50	1	IDR 0,00	1	IDR 0,00
		13	IDR 425.202.763,66	28	IDR 365.311.657,15	28	IDR 365.311.657,15	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		32	IDR 2.060.829.760,90	50	IDR 1.681.027.625,90	48	IDR 1.506.487.166,10	2	IDR 174.540.459,80	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		53	IDR 14.239.832.677,55	103	IDR 14.020.161.538,82	90	IDR 13.598.223.081,12	9	IDR 350.868.757,70	4	IDR 71.069.700,00	0	IDR 0,00
		17	IDR 25.885.924.249,89	26	IDR 25.885.924.249,89	21	IDR 25.431.273.943,40	5	IDR 454.650.306,49	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		22	IDR 5.448.175.681,97	39	IDR 4.891.302.666,43	31	IDR 2.424.483.939,85	8	IDR 2.466.818.726,58	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		38	IDR 6.958.308.340,99	94	IDR 7.873.610.787,32	75	IDR 5.084.874.213,47	15	IDR 2.702.988.965,85	4	IDR 85.747.608,00	0	IDR 0,00
		21	IDR 5.523.419.994,48	48	IDR 5.196.886.253,49	46	IDR 4.756.076.843,37	1	IDR 440.809.410,12	1	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		13	IDR 1.290.332.236,56	27	IDR 338.968.267,56	24	IDR 294.245.226,15	3	IDR 44.723.041,41	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		9	IDR 1.980.277.869,41	11	IDR 1.980.277.869,41	11	IDR 1.980.277.869,41	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		4	IDR 128.287.050,00	6	IDR 128.287.050,00	3	IDR 106.632.250,00	3	IDR 21.654.800,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
3	**Kabupaten Pandeglang**	342	74.311.983.314	669	32.396.806.405	383	12.827.383.637	179	12.986.193.702	107	6.583.229.065	0	0
		25	IDR 2.832.282.592,76	49	IDR 2.849.695.093,01	21	IDR 1.520.915.221,74	28	IDR 1.328.779.871,27	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		19	IDR 115.048.577,00	38	IDR 97.580.000,00	27	IDR 83.980.000,00	10	IDR 13.600.000,00	1	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		38	IDR 417.213.669,00	72	IDR 363.786.149,50	24	IDR 18.498.990,00	26	IDR 345.287.159,50	22	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		35	IDR 15.109.745.133,37	48	IDR 806.752.673,37	13	IDR 126.285.413,00	8	IDR 253.706.527,16	27	IDR 426.760.733,21	0	IDR 0,00
		26	IDR 5.210.774.872,78	50	IDR 4.978.218.616,15	33	IDR 1.947.527.006,51	15	IDR 3.030.691.609,64	2	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		22	IDR 29.249.865.960,44	35	IDR 8.215.735.596,87	25	IDR 660.983.344,00	4	IDR 1.656.220.215,87	6	IDR 5.898.532.037,00	0	IDR 0,00
		28	IDR 4.239.075.724,14	56	IDR 333.320.069,66	35	IDR 212.912.712,66	5	IDR 120.407.357,00	16	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		34	IDR 1.965.751.175,55	81	IDR 1.438.025.652,65	62	IDR 513.067.131,96	12	IDR 667.022.225,69	7	IDR 257.936.295,00	0	IDR 0,00
		39	IDR 6.467.293.219,02	96	IDR 6.244.539.232,84	85	IDR 4.612.786.229,84	11	IDR 1.631.753.003,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		32	IDR 4.843.333.246,77	58	IDR 3.579.360.353,10	41	IDR 2.689.579.969,51	17	IDR 889.780.383,59	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		20	IDR 2.887.360.293,47	38	IDR 2.515.554.117,29	11	IDR 305.688.110,00	27	IDR 2.209.866.007,29	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		24	IDR 974.238.850,08	48	IDR 974.238.850,08	6	IDR 135.159.508,00	16	IDR 839.079.342,08	26	IDR 0,00	0	IDR 0,00
	Kabupaten Serang	567	56.113.778.395	683	28.516.605.087	559	12.943.318.570	79	15.538.400.522	45	34.885.995	0	0
		42	IDR 5.583.081.793,63	0	0	0		0		0		0	
		42	IDR 760.823.055,44	0	0	0		0		0		0	
		94	IDR 5.300.015.586,40	0	0	0		0		0		0	
		46	IDR 1.910.611.278,10	71	IDR 1.386.737.760,79	61	IDR 373.074.981,81	10	IDR 1.013.662.778,98	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		31	IDR 2.325.020.648,97	68	IDR 1.932.844.773,15	55	IDR 548.757.988,95	12	IDR 1.384.086.784,20	1	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		52	IDR 130.137.168,79	94	IDR 0,00	87	IDR 0,00	7	IDR 0,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		26	IDR 2.003.537.567,06	42	IDR 1.489.007.246,57	35	IDR 531.660.193,64	5	IDR 922.461.057,87	2	IDR 34.885.995,06	0	IDR 0,00
		36	IDR 8.547.630.663,38	73	IDR 5.730.875.104,39	63	IDR 3.615.161.032,90	10	IDR 2.115.714.071,49	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		35	IDR 5.015.305.095,63	26	IDR 171.404.687,51	26	IDR 171.404.687,51	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		28	IDR 4.421.629.604,60	57	IDR 3.758.787.568,60	54	IDR 1.431.914.895,33	3	IDR 2.326.872.673,27	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		17	IDR 2.012.553.482,18	37	IDR 73.228.432,71	36	IDR 73.228.432,71	1	IDR 0,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		35	IDR 2.475.856.216,03	66	IDR 2.220.758.447,03	54	IDR 2.124.330.655,32	12	IDR 96.427.791,71	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		32	IDR 8.240.762.349,00	63	IDR 8.013.080.979,51	56	IDR 2.684.246.539,51	6	IDR 5.328.834.440,00	1	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		27	IDR 6.523.544.034,45	40	IDR 2.876.610.235,45	23	IDR 1.389.539.162,70	10	IDR 1.487.071.072,75	7	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		24	IDR 863.269.851,77	46	IDR 863.269.851,77	9	IDR 0,00	3	IDR 863.269.851,77	34	IDR 0,00	0	IDR 0,00
	Kabupaten Tangerang	672	191.130.468.056	1.359	67.225.142.583	1.172	44.807.922.053	120	22.388.685.530	67	28.535.000	0	0
		41	IDR 8.559.858.947,01	64	IDR 6.507.358.297,38	63	IDR 6.277.675.089,98	1	IDR 229.683.207,40	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		71	IDR 46.719.429.034,41	130	IDR 3.872.445.580,81	127	IDR 1.880.781.682,00	3	IDR 1.991.663.898,81	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		61	IDR 2.391.112.456,03	94	IDR 2.226.756.426,53	91	IDR 2.017.995.252,53	0	IDR 208.761.174,00	3	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		86	IDR 62.375.589.306,75	169	IDR 3.806.656.697,80	158	IDR 3.806.655.997,46	11	IDR 700,34	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		52	IDR 7.234.675.834,67	109	IDR 5.676.485.164,02	99	IDR 2.813.494.766,58	6	IDR 2.862.990.397,44	4	IDR 0,00	0	IDR 0,00

NO	Entitas	Temuan		Rekomendasi		Status Tindak Lanjut Rekomendasi							
						TS		TBS		BT		TDT	
		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
		15	IDR 49.710.491,84	28	IDR 49.710.491,84	26	IDR 49.710.491,84	2	IDR 0,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		41	IDR 2.855.924.004,25	70	IDR 2.442.322.441,95	63	IDR 2.135.791.441,95	7	IDR 306.531.000,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		58	IDR 4.394.713.102,99	91	IDR 2.426.494.566,62	86	IDR 2.426.494.566,62	4	IDR 0,00	1	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		49	IDR 5.372.883.196,70	94	IDR 1.629.733.062,66	67	IDR 1.601.198.062,66	23	IDR 0,00	4	IDR 28.535.000,00	0	IDR 0,00
		58	IDR 14.774.310.613,60	163	IDR 3.937.134.295,97	138	IDR 3.708.426.740,54	14	IDR 228.707.555,43	11	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		47	IDR 13.522.960.988,71	132	IDR 13.698.074.967,65	109	IDR 7.592.276.138,94	21	IDR 6.105.798.828,71	2	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		35	IDR 6.183.579.463,94	92	IDR 5.508.994.553,84	83	IDR 5.082.589.954,84	8	IDR 426.404.599,00	1	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		23	IDR 11.397.235.638,38	51	IDR 10.191.624.428,00	44	IDR 2.467.292.184,00	7	IDR 7.724.332.244,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		11	IDR 2.173.469.399,31	17	IDR 2.126.336.029,80	15	IDR 2.126.336.029,80	2	IDR 0,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		24	IDR 3.125.015.577,85	55	IDR 3.125.015.577,85	3	IDR 821.203.653,37	11	IDR 2.303.811.924,48	41	IDR 0,00	0	IDR 0,00
	Kota Cilegon	431	75.892.499.193	918	63.713.423.641	591	21.604.573.367	114	10.356.425.540	213	31.752.424.733	0	0
		8	IDR 38.480.000,00	10	IDR 38.480.000,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	10	IDR 38.480.000,00	0	IDR 0,00
		44	IDR 19.930.285.593,36	80	IDR 19.912.888.313,36	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	80	IDR 19.912.888.313,36	0	IDR 0,00
		42	IDR 15.565.427.786,10	96	IDR 11.025.190.773,14	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	96	IDR 11.025.190.773,14	0	IDR 0,00
		37	IDR 1.850.619.827,86	80	IDR 1.637.697.503,80	74	IDR 1.535.719.403,80	3	IDR 101.978.100,00	3	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		20	IDR 1.232.100.590,59	36	IDR 1.232.100.590,59	36	IDR 1.232.100.590,59	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		22	IDR 4.455.055.617,85	62	IDR 4.455.055.617,85	59	IDR 4.422.870.692,15	3	IDR 32.184.925,70	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		37	IDR 3.099.836.701,25	50	IDR 637.908.051,25	45	IDR 547.399.395,43	5	IDR 90.508.655,82	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		30	IDR 4.497.304.457,84	48	IDR 2.745.203.180,49	41	IDR 2.475.767.424,73	7	IDR 269.435.755,76	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		22	IDR 1.882.085.245,32	41	IDR 1.169.321.565,11	37	IDR 1.057.284.379,94	4	IDR 112.037.185,17	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		43	IDR 10.813.038.600,86	110	IDR 9.563.058.022,37	97	IDR 5.575.736.829,32	13	IDR 3.987.321.193,05	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		32	IDR 1.043.303.319,53	91	IDR 965.606.197,58	82	IDR 509.124.654,00	9	IDR 456.481.543,58	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		36	IDR 6.563.688.763,13	93	IDR 6.398.578.292,80	79	IDR 3.757.328.893,14	14	IDR 2.641.249.399,66	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		24	IDR 1.519.207.248,76	45	IDR 1.519.207.248,76	26	IDR 486.241.104,17	19	IDR 1.032.966.144,59	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		17	IDR 1.680.260.092,89	45	IDR 691.322.935,89	15	IDR 5.000.000,00	30	IDR 686.322.935,89	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		17	IDR 1.721.805.347,90	31	IDR 1.721.805.347,90	0	IDR 0,00	7	IDR 945.939.701,12	24	IDR 775.865.646,78	0	IDR 0,00
	Kota Serang	274	38.381.114.534	575	22.663.734.605	463	18.392.408.577	95	4.230.801.926	17	40.524.103	0	0
		24	IDR 89.031.762,87	55	IDR 78.309.892,87	54	IDR 78.309.892,87	1	IDR 0,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		21	IDR 232.905.726,05	47	IDR 232.905.726,05	46	IDR 232.905.726,05	1	IDR 0,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		26	IDR 1.821.093.744,44	39	IDR 1.799.253.744,44	35	IDR 1.799.253.744,44	3	IDR 0,00	1	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		27	IDR 6.818.753.811,39	50	IDR 1.809.500.168,39	49	IDR 1.551.755.251,69	1	IDR 257.744.916,70	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		35	IDR 8.628.728.359,20	63	IDR 1.504.085.336,32	45	IDR 897.019.133,00	9	IDR 566.542.100,40	9	IDR 40.524.102,92	0	IDR 0,00
		23	IDR 5.994.212.139,58	49	IDR 5.268.176.863,23	38	IDR 4.278.855.518,00	9	IDR 989.321.345,23	2	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		35	IDR 4.680.304.755,24	115	IDR 2.880.076.489,76	96	IDR 2.267.100.647,34	18	IDR 612.975.842,42	1	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		25	IDR 1.534.906.291,97	57	IDR 1.534.906.291,97	42	IDR 1.474.383.265,43	12	IDR 60.523.026,54	3	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		30	IDR 5.371.047.159,35	63	IDR 4.643.496.708,34	41	IDR 4.643.496.708,34	21	IDR 0,00	1	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		16	IDR 1.241.507.617,12	22	IDR 1.241.507.616,92	11	IDR 961.158.469,86	11	IDR 280.349.147,06	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		12	IDR 1.968.623.167,15	15	IDR 1.671.515.767,15	6	IDR 208.170.220,00	9	IDR 1.463.345.547,15	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
	Kota Tangerang	447	93.349.781.278	838	31.856.354.296	726	12.678.889.890	93	15.751.537.269	17	3.425.927.137	2	0
		24	IDR 2.668.433.828,95	45	IDR 2.381.007.503,89	42	IDR 1.749.407.503,89	3	IDR 631.600.000,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		44	IDR 330.140.551,77	62	IDR 43.687.000,00	60	IDR 43.687.000,00	2	IDR 0,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		23	IDR 686.545.053,94	28	0	28		0		0		0	
		25	IDR 833.520.000,00	41	0	41		0		0		0	
		50	IDR 2.308.111.890,27	89	IDR 2.038.378.398,37	87	IDR 1.537.998.108,37	2	IDR 500.380.290,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		13	IDR 2.301.084.439,88	35	IDR 1.300.072.542,69	35	IDR 0,00	0	IDR 1.300.072.542,69	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		37	IDR 8.161.059.643,38	55	IDR 7.446.988.136,00	53	IDR 264.888.136,00	2	IDR 7.182.100.000,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		36	IDR 1.454.757.688,87	63	IDR 850.610.140,45	60	IDR 657.529.140,45	3	IDR 193.081.000,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		31	IDR 4.106.020.274,00	43	IDR 124.393.785,25	36	IDR 14.393.785,25	7	IDR 110.000.000,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		43	IDR 54.804.712.395,13	117	IDR 5.848.100.004,18	94	IDR 5.086.004.995,18	18	IDR 762.095.009,00	3	IDR 0,00	2	IDR 0,00
		33	IDR 5.478.909.048,54	97	IDR 2.141.206.780,39	74	IDR 1.435.310.592,80	20	IDR 672.234.901,45	3	IDR 33.661.286,14	0	IDR 0,00
		25	IDR 4.137.344.358,44	61	IDR 4.137.344.358,43	59	IDR 538.974.142,56	2	IDR 3.598.370.215,87	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		27	IDR 592.645.317,00	45	IDR 58.068.858,00	31	IDR 0,00	14	IDR 58.068.858,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		18	IDR 583.775.507,40	35	IDR 583.775.507,40	19	IDR 111.750.000,00	14	IDR 472.025.507,40	2	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		18	IDR 4.902.721.280,83	22	IDR 4.902.721.280,83	7	IDR 1.238.946.485,00	6	IDR 271.508.945,00	9	IDR 3.392.265.850,83	0	IDR 0,00
	Kota Tangerang Selatan	297	176.379.860.590	576	47.363.242.988	475	33.386.518.400	94	13.346.496.868	6	630.227.720	1	0
		19	IDR 573.005.087,98	36	IDR 554.105.087,98	36	IDR 554.105.087,98	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		35	IDR 1.778.703.315,41	58	IDR 1.501.122.981,27	58	IDR 1.497.139.209,06	0	IDR 3.983.772,21	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		27	IDR 1.834.872.659,71	42	IDR 1.140.795.209,03	38	IDR 137.802.291,91	4	IDR 1.002.992.917,12	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		24	IDR 18.336.597.814,73	48	IDR 1.480.331.301,00	45	IDR 959.573.849,92	3	IDR 520.757.451,08	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		50	IDR 130.802.935.044,45	104	IDR 21.771.781.329,47	79	IDR 14.188.463.058,82	24	IDR 7.583.318.270,65	0	IDR 0,00	1	IDR 0,00
		34	IDR 5.083.853.138,66	88	IDR 5.015.557.292,66	71	IDR 3.405.382.865,43	17	IDR 1.610.174.427,23	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		31	IDR 7.254.431.820,12	61	IDR 6.951.186.201,34	57	IDR 6.924.693.143,84	2	IDR 26.493.057,50	2	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		46	IDR 3.550.075.349,94	93	IDR 2.056.407.140,80	62	IDR 1.627.582.738,11	29	IDR 325.680.360,73	2	IDR 103.144.041,96	0	IDR 0,00
		18	IDR 2.900.187.590,89	29	IDR 2.626.757.675,45	23	IDR 2.597.864.012,69	6	IDR 28.893.662,76	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00
		13	IDR 4.265.198.768,55	17	IDR 4.265.198.768,55	6	IDR 1.493.912.142,45	9	IDR 2.244.202.948,35	2	IDR 527.083.677,75	0	IDR 0,00
	Jumlah	**4.045**	**1.272.560.708.684**	**7.711**	**724.587.294.560**	**5.986**	**323.129.240.713**	**1.089**	**326.679.836.817**	**631**	**74.778.217.030**	**5**	**-**

Lampiran 5

INDIKATOR KINERJA TINGKAT IMPLEMENTASI STRATEGI PEMERIKSAAN DAN TINGKAT EVALUASI LHP
PERIODE PENGUKURAN TAHUN 2019

Satuan Kerja : Perwakilan Provinsi Banten
RKP : Tahun 2019
IKU : Tingkat Implementasi Strategi
Pengampu : Submit Renstra
Jumlah Pem. Keuangan : 9 entitas/objek
Jumlah Pem. Kinerja : 6 entitas/objek
Jumlah Pem. DTT : 5 entitas/objek (PDTT Non-Banparpol)

Tema	Fokus		TSAO	Jenis Pemeriksaan
Pendidikan	3&4	Program Indonesia Pintar Untuk Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas	Menilai peningkatan mutu sistem pembelajaran pendidikan dasar dan menengah.	Kinerja
Tata Kelola dan RB.	2	Peningkatan Pelayanan Publik	Menilai kualitas layanan publik (penyelenggaraan administrasi pertanahan, pelayanan peradilan, dan pelayanan publik lainnya) oleh instansi yg mencakup penerapan standar pelayanan dan kemudahan akses penerima layanan pemerintah.	Kinerja: Pemilu
Tata Kelola dan RB.	17	Reformasi Keuangan Negara	Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja negara/daerah dan subsidi.	Kinerja : PFM Kab Serang
Kesehatan		Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) - Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Menilai kualitas koordinasi, penyempurnaan manajemen, dan pemanfaatan sumber daya kesehatan dalam SJSN bidang JKN antar institusi pelaksana baik pemerintah maupun swasta.	Kinerja
Tata Kelola dan RB.	17	Reformasi Keuangan Negara	Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja negara/daerah dan subsidi.	Kinerja : PFM Kota Cilegon
Tata Kelola dan RB	2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Menilai kualitas layanan publik (penyelenggaraan administrasi pertanahan, pelayanan peradilan, dan pelayanan publik lainnya) oleh instansi yg mencakup penerapan standar pelayanan dan kemudahan akses penerima layanan pemerintah.	Kinerja : PDAM
Tata Kelola dan RB	17	Reformasi Keuangan Negara	Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan aset negara/daerah (termasuk investasi pada BUMN/BUMD)	PDTT: PT BGD
Belanja Infrastruktur	17	Reformasi Keuangan Negara	Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja daerah	PDTT
Belanja Infrastruktur	17	Reformasi Keuangan Negara	Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja daerah	PDTT
Belanja Infrastruktur	17	Reformasi Keuangan Negara	Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja daerah	PDTT
Belanja Infrastruktur	17	Reformasi Keuangan Negara	Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja daerah	PDTT

Lampiran 6

INDIKATOR KINERJA TINGKAT IMPLEMENTASI STRATEGI PEMERIKSAAN DAN TINGKAT EVALUASI LHP
PERIODE PENGUKURAN TAHUN 2019

Satuan Kerja : Perwakilan Provinsi Banten
RKP : Tahun 2019
IKU : Tingkat Implementasi Strategi
Pengampu : Submit Renstra
Jumlah Pem. Keuangan : 9 entitas/objek
Jumlah Pem. Kinerja : 6 entitas/objek
Jumlah Pem. DTT : 5 entitas/objek (PDTT Non-Banparpol)

No	Jenis Pemeriksaan	Tema/Fokus/TSAO	
1	Kinerja	Tema	Pendidikan
		Fokus	Program Indonesia Pintar Untuk Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas
		TSAO	Menilai peningkatan mutu sistem pembelajaran pendidikan dasar dan menengah.
		Objek Pemeriksaan	Pemerintah Kabupaten Tangerang
		AO/tujuan pemeriksaan	menilai efektivitas upaya pemerintah Kabupaten Tangerang dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun yang meliputi penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013. Lingkup pemeriksaan adalah Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019
		Simpulan	upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019 Tidak Efektif.
2	Kinerja	Tema	Tata Kelola dan RB.
		Fokus	Peningkatan Pelayanan Publik
		TSAO	Menilai kualitas layanan publik (penyelenggaraan administrasi pertanahan, pelayanan peradilan, dan pelayanan publik lainnya) oleh instansi yg mencakup penerapan standar pelayanan dan kemudahan akses penerima layanan pemerintah.
		Objek Pemeriksaan	KPU Provinsi Banten, KPU Kabupaten Pandeglang dan KPU Kabupaten Tangerang
		AO/tujuan pemeriksaan	Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi terkait lainnya ditujukan untuk menilai Efektivitas Pengelolaan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan akuntabilitas pada KPU
		Simpulan	KPU Provinsi Banten, KPU Kabupaten Pandeglang dan KPU Kabupaten Tangerang telah berupaya menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan perundangan, antara lain: pertanggungjawaban belanja honorarium BPP Ad Hoc telah tepat jumlah dan peruntukkannya; telah melaksanakan proses pengesahan DPT melalui mekanisme pleno pada setiap tingkatan; pembayaran kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih telah dilaksanakan sesuai ketentuan; dan pemungutan dan perhitungan suara telah dilakukan secara memadai. Namun hasil pemeriksaan BPK terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 menunjukkan permasalahan pokok yang perlu mendapat perhatian antara lain: 1. Pembayaran Honorarium Tim Kelompok Kerja tidak sesuai ketentuan pada KPU Provinsi Banten senilai Rp109.617.500,00 dan KPU Kabupaten Pandeglang senilai Rp14.397.500,00; 2. Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih belum sepenuhnya sesuai jadwal yang ditetapkan dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Pendistribusian Logistik Pemilu belum dilakukan secara tepat jumlah dan tepat sasaran. Apabila permasalahan di atas tidak segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, maka dapat memengaruhi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang.

3	Kinerja	Tema	Tata Kelola dan RB.
		Fokus	Reformasi Keuangan Negara
		TSAO	Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja negara/daerah dan subsidi.
		Objek Pemeriksaan	Pemkab Serang
		AO/tujuan pemeriksaan	Program/kegiatan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi merupakan dimensi dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kualitas hidup, yaitu: a. Kesehatan dengan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir; b. Pendidikan yaitu pengetahuan yang diukur dengan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah; dan c. Ekonomi, yang diukur dari standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran per kapita. Berdasarkan dimensi tersebut pemeriksaan kinerja ini dilakukan untuk menilai efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten Serang. Pengujian atas efektivitas pengelolaan belanja tersebut dilakukan pada program atau kegiatan yang mendukung upaya untuk meningkatkan pembangunan manusia yaitu pada sektor/bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai kewenangan pengelolaan belanja tersebut yang menjadi sampel pemeriksaan adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan OPD-OPD yang memiliki wewenang dan tupoksi dalam satu sektor/bidang pekonomian yang berkontribusi tertinggi terhadap PDRB di masing-masing daerah. Lingkup pemeriksaan ini juga meliputi upaya pemerintah daerah melalui penerbitan dan implementasi peraturan-peraturan daerah yang dapat mendorong peran swasta pada sektor/bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia.
		Simpulan	Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah yang dapat mempengaruhi efektivitas program dan kegiatan pembangunan manusia pada Kabupaten Serang, antara lain: 1. Penyusunan dan Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah Belum Memadai; 2. Penyusunan Pogram dan Kegiatan Belum Sepenuhnya Diprioritaskan untuk Pembangunan Manusia; 3. Pemerintah Kabupaten Serang Belum Melakukan Proyeksi Biaya Program dan Kegiatan Secara Memadai; dan 4. Perspektif Jangka Menengah Dalam Penganggaran Belanja Belum Selaras Dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah BPK menyimpulkan bahwa apabila tidak segera diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Serang maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia
4	Kinerja	Tema	Kesehatan
		Fokus	Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) - Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
		TSAO	Menilai kualitas koordinasi, penyempurnaan manajemen, dan pemanfaatan sumber daya kesehatan dalam SJSN bidang JKN antar institusi pelaksana baik pemerintah maupun swasta.
		Objek Pemeriksaan	Pemerintah Kabupaten Pandeglang
		AO/tujuan pemeriksaan	menilai efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester I 2019 pada pemerintah kabupaten pandeglang
		Simpulan	Pemerintah Kabupaten Pandeglang cukup efektif dalam pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester I 2019
		Tema	Tata Kelola dan RB.
		Fokus	Reformasi Keuangan Negara
		TSAO	Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja negara/daerah dan subsidi.
		Objek Pemeriksaan	Pemerintah Kota Cilegon

5	Kinerja	AO/tujuan pemeriksaan	Program/kegiatan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi merupakan dimensi dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kualitas hidup, yaitu: a. Kesehatan dengan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir; b. Pendidikan yaitu pengetahuan yang diukur dengan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah; dan c. Ekonomi, yang diukur dari standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran per kapita. Berdasarkan dimensi tersebut pemeriksaan kinerja ini dilakukan untuk menilai efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kota Cilegon. Pengujian atas efektivitas pengelolaan belanja tersebut dilakukan pada program atau kegiatan yang mendukung upaya untuk meningkatkan pembangunan manusia yaitu pada sektor/bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai kewenangan pengelolaan belanja tersebut yang menjadi sampel pemeriksaan adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan OPD-OPD yang memiliki wewenang dan tupoksi dalam satu sektor/bidang pekonomian yang berkontribusi tertinggi terhadap PDRB di masing-masing daerah. Lingkup pemeriksaan ini juga meliputi upaya pemerintah daerah melalui penerbitan dan implementasi peraturan-peraturan daerah yang dapat mendorong peran swasta pada sektor/bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia.
		Simpulan	Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah yang dapat mempengaruhi efektivitas program dan kegiatan pembangunan manusia pada Kota Cilegon, antara lain: 1. Permasalahan Transparansi Keuangan Publik; 2. Permasalahan Pengelolaan Belanja Program dan Kegiatan; 3. Permasalahan Kebijakan Strategi Fiskal dan Penganggaran BPK menyimpulkan bahwa apabila tidak segera diatasi oleh Pemerintah Kota Cilegon, maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia
	Kinerja	Tema	Tata Kelola dan RB
		Fokus	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		TSAO	Menilai kualitas layanan publik (penyelenggaraan administrasi pertanahan, pelayanan peradilan, dan pelayanan publik lainnya) oleh instansi yg mencakup penerapan standar pelayanan dan kemudahan akses penerima layanan pemerintah
		Objek Pemeriksaan	PDAM TKR Kabupaten Tangerang
		AO/tujuan pemeriksaan	Menilai efektivitas kegiatan penyediaan air bersih oleh PDAM TKR.
		Simpulan	PDAM TKR kurang efektif dalam melaksanakan kegiatan penyediaan air bersih Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun Anggaran 2019
	PDTT	Tema	Tata Kelola dan RB
		Fokus	Reformasi Keuangan Negara
		TSAO	Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan aset negara/daerah (termasuk investasi pada BUMN/BUMD)
		Objek Pemeriksaan	PT BGD
		AO/tujuan pemeriksaan	Pemeriksaan: Menilai apakah kegiatan pengelolaan investasi khususnya akuisisi Bank Pundi oleh PT BGD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		Simpulan	Tidak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
	PDTT	Tema	Belanja Infrastruktur
		Fokus	Reformasi Keuangan Negara
		TSAO	Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja daerah
		Objek Pemeriksaan	Pemerintah Kota Tangerang
		AO/tujuan pemeriksaan	Menilai apakah Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Tangerang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Simpulan	Sesuai Dengan Pengecualian
		Tema	Belanja Infrastruktur
		Fokus	Reformasi Keuangan Negara

	PDTT	TSAO	Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja daerah
		Objek Pemeriksaan	Pemerintah Provinsi Banten
		AO/tujuan pemeriksaan	Menilai apakah Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
		Simpulan	Tidak Sesuai Kriteria
	PDTT	Tema	Belanja Infrastruktur
		Fokus	Reformasi Keuangan Negara
		TSAO	Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja daerah
		Objek Pemeriksaan	Pemerintah Kota Tangerang Selatan
		AO/tujuan pemeriksaan	Menilai apakah Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
		Simpulan	Sesuai Dengan Pengecualian
	PDTT	Tema	Belanja Infrastruktur
		Fokus	Reformasi Keuangan Negara
		TSAO	Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja daerah
		Objek Pemeriksaan	PemerintahKota cilegon
		AO/tujuan pemeriksaan	AO/Tujuan Pemeriksaan: Menilai apakah Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Tangerang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Simpulan	Sesuai Dengan Pengecualian

Lampiran 7

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Satuan Kerja Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Banten

Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2019	Realisasi	%
(1)	(2)		(3)		
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	77,69%	104%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	100%	100%
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	100%	105%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	30%	30%	100%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100,00%	100%
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	18	18	100%
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan *Quality Control* dan *Quality Assurance* Pemeriksaan	100%	100%	100%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9	4,42	113%
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%
	IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100%
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK RI Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar	5	4,43	89%
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5	6,46	129%
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	A	90,00%
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,18%	103%
	IK 3.2.3	Jumlah *Best-Practice* yang Disusun	1,00	1,00	100%
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan *Best-Practice*	100%	100%	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	1	1,6	160%
	IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	93%	93,99%	101%
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	86,49%	86%
	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pegawai Menejerial	100%	88,57%	89%
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	88,50%	111%

Lampiran 8

PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN DENGAN CAPAIAN TIGA TAHUN TERAKHIR

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2018	Capaian 2019	Capaian 2018	Capaian 2017
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	-6
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	77,69%	77,25%	65,57%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	100%	100%	2
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	100%	100%	0
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	30%	20%	30%	23,81%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100,00%	100,00%	100%
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	18	18	18	18
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan *Quality Control* dan *Quality Assurance* Pemeriksaan	100%	100%	100%	4,50
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9	4,42	4,57	100%
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%
	IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100%	100%
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK RI Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar	5	4,43	3,67	0
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5	6,46	4,55	0
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100	100	0
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	A	BB	A
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,18%	96,97%	0
	IK 3.2.3	Jumlah *Best-Practice* yang Disusun	1,00	1,00	0,00	0,00
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan *Best-Practice*	100%	100%	100%	100%

Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100%	100%
	IK 3.2.6	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	1	1,6	1,6	3,2
	IK 3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	93%	93,99%	93,00%	93,85%
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	86,49%	76,32%	89,47%
	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pegawai Menejerial	100%	88,57%	82,76%	54,55%
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	88,50%	86,42%	

Lampiran 9

PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN DENGAN TARGET LIMA TAHUN

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2019	Persentase Reali98 dibanding target Kinerja Tahun 2020
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	80%	77,69%	97,11%
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	1	1	100,00%
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100,00%
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	18%	18%	18%	18%	18%	30%	166,67%
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	18	18	18	18	18	18	100,00%
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
IK 2.1.1	Pemenuhan *Quality Control* dan *Quality Assurance* Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4,42	110,50%
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100,00%
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,42	100,00%
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,64	100,00%
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100,00%
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A	A	100,00%
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	98,18%	98,18%
IK 3.2.3	Jumlah *Best-Practice* yang Disusun	0%	0%	0%	0%	0%	1,00	100,00%
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan *Best-Practice*	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100,00%
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	96%	97%	98%	99%	93,99%	94,94%
IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	2	2	2	2	1,60	80,00%
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%	86,49%	86,49%
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pegawai Menejerial	100%	100%	100%	100%	100%	88,57%	88,57%
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	90%	92%	94%	95%	96%	88,50%	92,19%